

Analisis Framing “Zero Tolerance” Pada Film Indonesia: Diversity Under Threat di Youtube DW Documentary

Framing Analysis “Zero Tolerance” on Film Indonesia: Diversity Under Threat in Youtube DW Documentary

Fitri Rezkia, Syahrul Abidin & Rholand Muary*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 14 Desember 2021; Direview: 14 Desember 2021; Disetujui: 14 Februari 2022

*Corresponding Email: rholandmuary@uinsu.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DW Documentary membingkai makna dan pelaku “zero tolerance” yang dinilai sebagai ancaman di Indonesia melalui karya jurnalistik berupa film dokumenter, Indonesia: Diversity under Threat. Masalah difokuskan pada bagaimana pemingkai media dalam mempresentasikan film tersebut. Guna mendekati masalah ini dipergunakan landasan teori dari Peter L. Berger & Thomas Luckmann yaitu konstruksi sosial atas realitas yang diinovasi menjadi konstruksi sosial media massa serta teori dari Pamela J. Shoemaker & Stephen D. Reese yaitu teori hirarki pengaruh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi yaitu pengamatan secara mendalam dan dianalisis melalui analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Kajian ini menyimpulkan bahwa DW Documentary membingkai makna “zero tolerance” sebagai ancaman terbesar bagi negara Indonesia yaitu intoleransi beragama. Dalam hal intoleransi beragama media melalui pemilihan kata, pernyataan, serta kutipan membingkai label tersebut kepada masyarakat populis yaitu yang beragama Islam. Dalam hal ini, media mengkhususkan kepada Islam yang konservatif, melalui hukum Syari’ah yang dinilai mendiskriminasi masyarakat minoritas, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan feminisme. Pelaku intoleransi dibahasakan dengan fundamentalis dan radikal. DW Documentary lewat tayangannya menggambarkan fundamentalis dan radikal dengan kekerasan, ketidakadilan, dan tidak menerima perbedaan atau disebut dengan intoleransi.

Kata Kunci: Framing; Konstruktivisme; Film; DW Documentary

Abstract

This paper aims to find out how DW Documentary frames the meaning and perpetrators of “zero tolerance” which is considered at threat in Indonesia through journalistic work in the form of the documentary film, Indonesia: Diversity under Threat. The problem is focused on how to frame the media in presenting the film. To approach this problem, the theoretical basis of Peter L. Berger & Thomas Luckmann is used, namely the social construction of reality which is innovated into the social construction of mass media and the theory of Pamela J. Shoemaker & Stephen D. Reese, namely the theory of the hierarchy of influence. The research approach used is a qualitative approach. The data were collected through observation techniques, namely in depth observations and analyzed through framing analysis of the Zhongdang pan dan Gerald M. Kosicki model. This study concludes that DW Documentary frames the meaning of “zero tolerance” as the biggest threat to the Indonesian state, namely religious intolerance and corruption. In terms of religious intolerance, the media through the choice of words, statements, and quotes frame the label for a populist Muslim community. In this case, the media specializes in conservative Islam, through Syariah law which is considered to discriminate against minority communities, contrary to human rights and feminism. The perpetrators of intolerance were discussed with fundamentalist and radicals with violence, injustice, and does not accept differences or called intolerance.

Kata Kunci: Framing; Constructivism; Film; Documentary

How to cite: Rezkia, F. Abidin, S. & Muary, R. (2022), Analisis Framing “Zero Tolerance” Pada Film Indonesia: Diversity Under Threat Di Youtube DW Documentary, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(4): 2201-2211



PENDAHULUAN

Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol negara Indonesia yang menjadi landasan toleransi di bumi pertiwi. Negara multikultural sekaligus negara multiagama menjadikan keberagaman di Indonesia seharusnya dimaknai sebagai kekuatan bukan menjadi penghalang dalam persatuan. Sayangnya, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis toleransi. Agama sebagai kompas kehidupan seyogianya dipahami sebagai pembina persatuan, kebersamaan, dan penumbuh cinta kasih antar sesama. Sadulloh (2003) berpendapat bahwa akar dari lahirnya intoleransi beragama adalah klaim kebenaran (*truth claim*), di mana seseorang merasa kepercayaannya benar dan kepercayaan lain salah. Hal ini menumbuhkan sikap tidak menerima perbedaan dan hilangnya rasa saling menghargai. Indonesia sebagai negara multikultural dan multiagama sangat membutuhkan sikap tenggang rasa sehingga melahirkan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Pluralitas agama, budaya, suku, serta bahasa di Indonesia memunculkan kekhawatiran berbagai kalangan, yang disebabkan maraknya kasus intoleransi dan kekerasan (Misrawi, 2012). Berdasarkan riset *Setara Institute* pada tahun 2020, telah terjadi sedikitnya 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 422 tindakan yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Data ini menunjukkan peningkatan krisis toleransi dari tahun sebelumnya. Bukan menjadi hal yang baru jika agama di dunia dinilai sebagai pemicu sikap intoleransi dan dianggap sebagai paradoks.

Toleransi merupakan isu hangat yang selalu menjadi perhatian bagi banyak pihak khususnya media. Konflik terutama berkaitan dengan agama selalu menjadi perhatian publik sehingga memiliki nilai berita. Darsono & Muhaemin (2012) menyatakan bahwa konflik selalu menarik perhatian wartawan untuk menulis berita. Melalui produk jurnalistik baik berupa tulisan ataupun film media mampu mengkonstruksi persepsi publik. Film khususnya merupakan salah satu alat komunikasi massa yang memiliki pengaruh cukup besar dalam mengkonstruksi perspektif khalayak terhadap suatu hal melalui kekuatan visual gambar dengan merepresentasikan realitas yang dapat menyentuh emosi khalayak sehingga nilai dan pandangan dapat diterima khalayak.

Karya jurnalistik yang telah didistribusikan tidak dapat dinilai apa adanya. Karena dalam hal ini fakta di lapangan akan diproduksi melalui berbagai proses, mulai dari proses pencarian fakta melalui pemilihan narasumber, penulisan fakta, hingga pendistribusiannya. Media tidak hanya sebuah *channel* yang meliput apa adanya suatu peristiwa. Media melalui wartawan merupakan aktor yang mampu mengkonstruksi peristiwa berdasarkan sudut pandang media itu sendiri. Media sebagai sumber informasi memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk, mengubah dan menguatkan serta mempengaruhi persepsi massa terhadap suatu hal. Sehingga dibutuhkan suatu konsep yang dapat menganalisis pemberitaan di media agar lebih kritis dalam menerima informasi.

Salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah konsep analisis *framing*. Analisis *framing* lahir berdasarkan paradigma konstruktivisme dan teori Konstruksi Sosial atas Realitas. Glaseferld dan Kitchener berpendapat dalam konstruktivisme pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia nyata dan bukanlah suatu kebenaran yang hakiki (dalam Ardiyanto, 2007, p. 155). Manusia senantiasa menciptakan makna berdasarkan pengetahuan dan perspektifnya, sehingga makna tersebut bersifat nisbi. Berger dan Luckmann (1966) berpandangan bahwa konstruksi sosial tidak dapat dinilai apa adanya, namun sarat dengan beragam maksud dan tujuan. Jika dikaitkan dengan media massa sebagai pihak media informasi, informasi yang disajikan tentu memiliki maksud dan tujuan di dalamnya. Analisis *framing* lahir untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut.

Penelitian *framing* media mengenai intoleransi pernah dilakukan Enjang Muhaemin dan Irfan Sanusi, Martini, Muhammad Fikri, dan Zakiyah. Muhaemin & Sanusi (2019) dalam penelitian bertajuk "Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas" mengkaji bagaimana pbingkai surat kabar Kompas dalam mengemas wacana intoleransi keagamaan di Indonesia menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Peneliti menyimpulkan bahwa Kompas

memframing masalah intoleransi keagamaan sebagai ancaman yang membahayakan NKRI, dan hal ini diakibatkan oleh pemahaman agama yang dangkal, parsial dan tidak mendalam.

Penelitian Fikri (2012) yang berjudul "*Konflik Agama dalam Media Berita Online*" menggunakan kajian kritis terhadap pemberitaan konflik Cikeusik dalam Portal Viva.co.id menyimpulkan bahwa media memframing massa penyerang sebagai pihak yang brutal, sedangkan pihak korban dikonstruksi sebagai pihak yang dirugikan yang mengalami trauma psikologis.

Penelitian Zakiyah (2015) dengan judul "*Agama dalam Konstruksi Media Massa: Studi terhadap Framing Kompas dan Republika pada Berita Terorisme*". Kesimpulan penelitian ini adalah Kompas dan Republika menyatakan bahwa Islam tidak terkait dengan terorisme. Perbedaannya adalah Republika secara tegas mengatakan jika pesantren tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Sedangkan Kompas menjelaskan adanya pro dan kontra mengenai hal tersebut.

Penelitian Martini (2018) bertajuk "*Konstruksi Aksi Damai 4 November 2016*" mengkaji bagaimana koran Kompas, Republika, Media Indonesia, Tempo serta Sindo dalam memframing berita aksi damai 4 November menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Peneliti menyimpulkan bahwa beragam media mengemas berita dengan *framing* yang berbeda. Kompas dan Media Indonesia memframing aksi ini ditunggangi aktor-aktor politik. Tempo lebih menonjolkan kerusuhan yang terjadi setelah aksi usai. Republika menilai bahwa aksi ini merupakan aksi yang damai, aman, dan bermartabat. Dan Sindo menilai aksi ini sebagai aksi yang terkendali. Perbedaan konstruksi terhadap aksi damai 4 November diakibatkan perbedaan sudut pandang media dalam menilai peristiwa.

Perbedaan dalam mengkonstruksi peristiwa, media tentu dipengaruhi faktor ideologi, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Entman dalam Sudibyo (2009) menegaskan bahwa melalui analisis *framing* diketahui bahwa fakta-fakta yang diberitakan media telah melalui proses seleksi dan penajaman terhadap isu tertentu

Analisis *Framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana media memaknai peristiwa melalui penyeleksian, pemilihan, dan penonjolan isu dalam penulisan berita. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis film dokumenter "*Indonesia: Diversity under Threat*" melalui *channel* YouTube DW Documentary. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana DW Documentary membingkai makna dan pelaku "*Zero Tolerance*" pada film tersebut menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pemilihan model analisis *framing* Pan dan Kosicki adalah karena model ini memiliki empat struktur perangkat analisis sehingga dengan objek penelitian berupa film diharapkan dapat dianalisis secara mendalam.

Pemilihan *channel* YouTube DW Documentary adalah karena merupakan media asing yang fokus pada topik yang dinilai menjadi masalah dalam sebuah negara. Pemilihan film karena membahas isu toleransi di Indonesia. Melalui media YouTube, konten ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia, sehingga pesan yang ada di dalamnya memiliki jangkauan yang sangat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan kepustakaan. Teknik observasi yang digunakan adalah teknik non partisipan di mana peneliti sebagai pengamat. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah pengamatan terstruktur. Artinya, pengamatan yang dilakukan secara sistematis berpedoman dengan analisis data yang digunakan.

Objek penelitian ini adalah film "*Indonesia: Diversity under Threat*". Tahapan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menonton film tersebut berulang kali. Setelah itu peneliti akan melakukan analisis menggunakan analisis *framing*. Peneliti juga mengumpulkan bahan bacaan serta beragam teori sebagai rujukan dan pedoman dalam melakukan analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selanjutnya, peneliti menyajikan data berdasarkan hasil analisis dalam bentuk teks. Setelah itu

melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi didukung bukti yang valid disertai data yang diperoleh saat melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DW Documentary dan Film Indonesia: Diversity under Threat

DW (*Deutsche Welle*) Documentary merupakan lembaga penyiaran internasional yang memproduksi siaran TV, radio, dan konten internet dalam 30 bahasa. Media yang awalnya sebagai stasiun Televisi saat ini telah berinovasi dengan menggunakan jaringan internet dalam pendistribusian informasi, yaitu melalui Instagram (@DW Documentary Instagram), YouTube (DW Documentary, DW Docarabia YouTube, DW Doku Youtube, DW Indonesia), Facebook (DW Documental Facebook), serta blog (dw.com).

Saat ini *channel DW Documentary* telah memiliki 3,66 juta *subscriber*. Akun ini berisi konten-konten berupa informasi dari berbagai negara dengan beragam topik yang dikemas dengan menarik, salah satunya melalui karya film dokumenter yang menjadi ciri khas media ini. Adapun topik pilihan yang dibahas adalah berupa bisnis, olahraga, seni dan budaya, dokumenter dan fitur, gaya hidup dan hiburan, berita dan politik, kesehatan, sains dan lingkungan, serta acara *talkshow*.

Salah satu topik yang dibahas di negara Indonesia adalah krisis toleransi melalui film dokumenter berjudul “*Indonesia: Diversity under Threat*”. Media melihat adanya ancaman besar bagi keutuhan NKRI sebagai negara peleburan budaya dan agama. Berdasarkan hal tersebut *DW Documentary* melakukan perjalanan investigasi ke Indonesia untuk mengetahui apakah Indonesia mampu menahan tekanan kaum fundamentalis dan akan mengarah kemanakah Indonesia. Melalui perjalanan investigasi ke berbagai daerah di Indonesia yaitu Aceh, Sabang, Jakarta, serta Yogyakarta media ingin mengetahui sebab terjadinya krisis toleransi di Indonesia dengan mewawancarai berbagai narasumber. Hasil liputan media ini diproduksi melalui film dokumenter yang didistribusikan melalui YouTube. YouTube sebagai media baru merupakan platform kedua terbanyak digunakan di dunia memiliki peranan dalam mempengaruhi kehidupan sosial.

Analisis Framing “Zero Tolerance” pada Film Indonesia: Diversity under Threat

Sobur (2009) mengartikan *framing* adalah perangkat yang bertujuan menganalisis bagaimana cara pandang atau perspektif wartawan ketika menyeleksi isu dan penulisan berita. Bagaimana suatu peristiwa yang sama atau tokoh yang sama dapat digambarkan dan dicitrakan secara berbeda oleh media yang berbeda. Tujuan dari analisis *framing* adalah untuk mengetahui bagaimana media melihat, menilai, hingga mengkonstruksi suatu peristiwa.

Terdapat empat perangkat analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat perangkat ini akan membantu dalam menganalisis bagaimana media mengkonstruksi atau membingkai peristiwa.

Struktur Sintaksis. Struktur sintaksis bertujuan untuk menganalisis bagaimana penulis merangkai suatu peristiwa melalui perangkat skema berita yang dapat diamati melalui judul, *thumbnail*, *lead*, kutipan narasumber, pernyataan, serta penutup.

Film ini berjudul “*Indonesia: Diversity under Threat*”, dengan “*zero tolerance*” menjadi *thumbnail* film ini. Berdasarkan judul, film ini menginformasikan bahwa adanya ancaman dalam persatuan negara Indonesia sebagai negara yang beragam, multikultural. Kata *Zero tolerance* pada *thumbnail* memperkuat gagasan dari judul tersebut. Berdasarkan judul dan *thumbnail* dapat disimpulkan bahwa ancaman dalam keberagaman di Indonesia adalah *zero tolerance* atau krisis toleransi. Berangkat dari permasalahan tersebut media *DW Documentary* melakukan perjalanan investigasi untuk mengetahui bagaimana ancaman dalam keberagaman di Indonesia.

Adapun pengantar dalam film ini memberi gambaran mengenai *zero tolerance*.

“Kecenderungan yang berkembang ke arah penafsiran Islam yang lebih konservatif juga terlihat di bagian lain Indonesia sekuler. Lebih banyak wanita yang memakai jilbab di tempat umum. Niqab, cadar, menjadi semakin populer. Anggota kelompok minoritas merasa terpinggirkan”.

“Kekuatan-kekuatan Islamis bermaksud mengubah negara yang beraneka ragam menjadi negara teokrasi. Sampai saat ini, serangan teroris terutama menargetkan minoritas Kristen. Beberapa ratus orang Indonesia telah bergabung dengan organisasi Negara Islam atau ISIS”. (Menit 3.03-3.24)

Berdasarkan kata pengantar dari film ini, media ingin memberikan sebuah pandangan bahwa pengaruh Islam yang konservatif melahirkan sikap intoleransi yang mendiskriminasi kelompok minoritas. Media berpandangan dengan populernya simbol Islam seperti jilbab, niqab, dan cadar menjadikan kelompok minoritas merasa terpinggirkan. Pernyataan kekuatan Islamis memberi pemahaman bahwa Islam dinilai menjadi ancaman di Indonesia. Media menggambarkan serangan teroris disebabkan oleh kekuatan Islamis yang menginginkan Indonesia berubah menjadi negara teokrasi.

Beberapa kutipan sumber pada film ini memberi pemahaman bahwa yang menjadi ancaman di Indonesia adalah meningkatnya intoleransi khususnya intoleransi beragama yang berasal dari pemahaman Islam yang konservatif di era modern, salah satunya adalah hukum Syariah yang berlaku di Aceh.

Narasumber pertama adalah Abi Wahid, pemimpin FPI cabang Aceh. Narasumber ini menilai hukum Syariah sangat tepat dipakai di Indonesia.

“Khilafah masa jaya Islam. Sebenarnya di Aceh itu sudah pernah jaya dengan hukum Islam. Maka sangat cocok kalo kita kembali ke sistem Islam. Semua terayomin, tidak ada yang tertindas. Kapan terjadi perang Dunia ke-2, setelah khilafah setelah orang Islam tidak menguasai dunia maka banyak terjadi perang pembantaian di mana-mana”. (Menit 5.25-5.51)

Gagasan ini bertentangan dengan gagasan narasumber lain, yaitu Raihal Fajri dan Balqis Guittido yang menilai hukum Syariah bertentangan dengan aturan Islam dan mempersulit kebebasan individu.

“Ini tidak baik. Karena ini adalah siksaan (hukum cambuk). Ini bukan budaya kita. Ini tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia namun juga bertentangan dengan aturan Islam. (Fajri, Menit: 15.46-15.57)

“Saya hanya tidak suka bagaimana faktanya mereka memaksa saya. Ketika saya ingin berdoa, saya berdoa. Ketika saya ingin berjilbab saya berjilbab”. (Guittido, Menit: 21.40-21.52)

“Begitu banyak perempuan menderita, dan terutama di tempat saya. Kami tidak bisa membuat keputusan dengan pernikahan, dengan studi, karena kami perempuan. Semua yang kami katakan jawabannya adalah tidak, tidak”. (Guittido, Menit: 23.05-23.24)

Berdasarkan kutipan dari kedua narasumber mempertegas bahwa hukum Syariah yang diterapkan di Aceh mengekang kebebasan bagi masyarakatnya dan khususnya bagi perempuan yang tidak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Islam yang konservatif digambarkan dengan tidak memberikan hak suara pada perempuan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Narasumber selanjutnya adalah Dewi Anggraini, media membahas mengenai alasan bercadar dan pendapatnya terhadap poligami. Melalui pembahasan mengenai cadar dan poligami media mengaitkannya dengan *zero tolerance*, karena dinilai mengekang kebebasan perempuan. Media menjelaskan bahwa cadar bukanlah kebudayaan Indonesia serta dinilai menjadi penyebab agama minoritas merasa terpinggirkan. Sedangkan poligami bertentangan dengan ideologi feminisme.

Pemberlakuan hukum Syariah memiliki penilaian tersendiri bagi seorang politisi sekaligus Direktur Wahid *Foundation*, Yenni Wahid melalui pernyataan:

“Kami memahami bahwa ada keragaman yang membentuk tulang punggung negara ini, dan keberagaman itu harus dihormati. Dan jika anda kemudian, jika kita mengadopsi negara Islam sebagai identitas nasional kita, maka akan ada diskriminasi terhadap non muslim, dan keragaman tidak akan berarti apa-apa”. (Menit: 33.46-34.03)

“Saya merasa agama saya dirampok dari ajaran sakralnya oleh orang-orang yang mengartikulasikan cara mereka memandang agama hanya dengan cara yang negatif. Dan Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang akan mengampunimu,

tidak peduli apapun dosamu. Tuhan yang menginginkan yang terbaik untuk kemanusiaan. Tuhan yang merangkul segala jenis”. (Menit: 34.45-35.23)

Yenni Wahid dalam hal ini menilai Indonesia tidak adil jika menerapkan hukum Islam, karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam agama. Menurutnya, penerapan hukum Syariah adalah kesalahan dalam mengartikulasikan ajaran agama Islam. Berlakunya hukum Islam dikhawatirkan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa karena berpotensi mendiskriminasi agama lain. Ancaman terbesar menurutnya bagi keragaman Indonesia selain intoleransi adalah kasus korupsi yang dianggap mustahil lenyap di Indonesia.

Berbagai peristiwa disajikan melalui seleksi dalam gagasan tertentu sehingga pembaca melihat peristiwa dari hasil seleksi tersebut. Dalam hal ini media menyederhanakan berbagai informasi dengan menonjolkan informasi tertentu sehingga khalayak fokus pada apa yang ditonjolkan. Berdasarkan teori Konstruksi Sosial Media Massa (Bungin, 2000), media memiliki peranan, salah satunya mengkonstruksi peristiwa dalam *frame* tertentu (Eriyanto, 2011). Dalam hal ini fakta-fakta berdasarkan informasi dari narasumber yang dihimpun *DW Documentary* memberikan pandangan bahwa ancaman terbesar bagi keragaman di Indonesia adalah intoleransi beragama dan korupsi. Namun, media lebih banyak membahas mengenai intoleransi. Artinya, media menempatkan isu intoleransi menjadi masalah yang sangat penting dalam film ini. Intoleransi dikaitkan dengan pengaruh Islam yang semakin besar yang dinilai dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kalimat penutup pada film ini yang menyatakan bahwa korupsi, nepotisme, konsensi kaum Islamis, intoleransi akan membatasi kebebasan, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar.

Melalui struktur sintaksis, peneliti menyimpulkan bahwa *framing* media terhadap “zero tolerance” yang menjadi ancaman persatuan Indonesia disebabkan oleh masyarakat populis yaitu Islam melalui penerapan hukum Syari’ah yang berlaku di Aceh. Media memberi gambaran bahwa hukum Syari’ah mengekang kebebasan individu, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan ideologi feminisme.

Struktur Skrip. Struktur skrip menganalisis bagaimana strategi penulis dalam memproduksi atau mengisahkan peristiwa dan mengemasnya menjadi sebuah berita. Dalam menceritakan sebuah peristiwa seorang penulis akan menggunakan gaya bercerita tertentu dengan tujuan pesan yang dikomunikasikan dapat sampai kepada khalayak. Untuk memahami sebuah peristiwa dapat dilihat melalui urutan penyusunan peristiwa.

Perjalanan investigasi dimulai dari Provinsi Aceh dengan menemui Abi Wahid, pemimpin FPI cabang Aceh di pondok pesantren dan TPA yang dikelolanya lalu mendatangi kediamannya dan mewawancarai istrinya (Dewi Anggraini) mengenai alasan menggunakan cadar dan pendapatnya mengenai poligami. Setelah itu menemui aktivis HAM, Raihal Fajri dengan menanyakan mengapa Aceh menerapkan hukum Syari’ah serta pendapatnya mengenai hukum cambuk dan beberapa peraturan yang berlaku di Aceh. Kemudian, reporter menuju Sabang dan menemui Balqis Guittido seorang pemilik salah satu *resort* di Sabang. Pembahasan dengan Balqis adalah kenapa ia membuka hijabnya padahal sebelumnya dia mengenakan hijab serta bagaimana pandangan Balqis mengenai hukum Syariah yang berlaku di Aceh. Setelah itu, reporter menemui polisi Islam dan ikut berpatroli, pertanyaannya juga seputar pandangannya mengenai hukum Syariah. Lalu, repoter menuju Jakarta, ibukota Indonesia. Di sini mereka menemui komunitas Niqab Squad dan menanyai alasan mereka mengenakan cadar. Mereka juga menemui Yenni Wahid seorang politisi sekaligus pendiri *Wahid Institute*. Mereka mewawancarai mengenai pendapat Yenni Wahid tentang ancaman terbesar di Indonesia. Setelah itu perjalanan terakhir adalah Yogyakarta dengan menemui beberapa aktivis mahasiswa dan bertanya pendapat mereka tentang apa ancaman dalam keberagaman Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian *Setara Institute* menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama terbanyak pada tahun 2020 berada di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Aceh, DKI Jakarta lalu disusul Jawa Tengah. Namun, media justru melakukan investigasi pertama ke wilayah Aceh. Menurut peneliti alasan pemilihan wilayah Aceh karena wilayah ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Syariah dan wilayah ini 98%

penduduknya beragama Islam. Media secara tidak langsung ingin mengaitkan hukum Syariah dengan krisis intoleransi (*zero tolerance*).

Berdasarkan strategi penulisan, media mendeskripsikan Indonesia sebagai kepulauan terbesar dengan ratusan bahasa, agama, dan budaya yang berbeda. Kemudian pengantar dalam film ini menjelaskan bahwa ada kekuatan-kekuatan Islamis yang bermaksud mengubah negara Indonesia yang beragama menjadi negara teokrasi melalui serangan-serangan teroris yang menargetkan kaum minoritas (non muslim). Setelah memberi pernyataan sebagai pembuka film, media melanjutkan dengan memaparkan kutipan sumber yang pro dengan hukum Syari'ah. Narasumber yang pro dengan hukum Syari'ah mengatakan bahwa kekhalifahan adalah puncak Islam, dan semua terayomi dan tidak ada yang tertindas baik masyarakat muslim maupun non muslim. Lalu dilanjutkan dengan kutipan narasumber lain yang kontra terhadap hukum Syari'ah. Narasumber yang kontra menyatakan bahwa hukum Syari'ah membatasi kebebasan terutama bagi perempuan, dan sebagian peraturan seperti hukum cambuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hukum Syariah juga dinilai mendiskriminasi masyarakat minoritas dan bertentangan dengan ideologi feminisme. Di akhir, media memberikan pernyataan yang juga merupakan pandangan narasumber yang dijadikan sebagai solusi agar Indonesia mampu menahan tekanan dari kaum fundamentalis.

Solusi lahir tergantung dari bagaimana media menilai peristiwa dan apa atau siapa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Merujuk pada data penelitian, *DW Documentary* memaparkan cara agar Indonesia mampu menahan tekanan dari kaum fundamentalis. Diantaranya adalah menentang korupsi dan nepotisme, menentang konsesi (pemberian hak) kepada kaum Islamis yang ingin membatasi kebebasan, menentang intoleransi dan kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin. Media melihat pelaku intoleransi berasal dari masyarakat populis yaitu Islam melalui penerapan hukum Syariah. Berdasarkan strategi penulisan, film ini dibuka dengan pernyataan kaum Islamis ingin mengubah negara Indonesia menjadi teokrasi. Melalui pembahasan mengenai hukum Syariah, cadar, poligami, sehingga media cenderung menonjolkan sisi intoleransi dari hukum dan simbol-simbol keagamaan Islam. Diikuti dengan solusi media yang menyatakan bahwa dengan menentang toleransi dan nepotisme, konsesi kepada kaum Islamis, dan intoleransi Indonesia mampu bertahan.

Struktur Tematik. Struktur tematik merupakan struktur yang menganalisis metode atau cara yang digunakan penulis menuangkan pandangan atau pendapatnya berkaitan dengan peristiwa ke dalam sebuah paragraf dan bagaimana hubungan antar kalimat yang melengkapi dan membentuk teks. Bagaimana fakta ditulis berdasarkan informasi dari informan disertai dengan pandangan penulis terhadap peristiwa. Wartawan dalam melihat peristiwa dipengaruhi pandangan dari pengalaman atau budayanya sehingga dalam melihat sebuah peristiwa sudah ada persepsi mengenai peristiwa tersebut.

Dalam mengamati dan menganalisis struktur tematik, salah satu elemen yang menjadi perangkat adalah koherensi. Kejadian yang berbeda dan tidak berhubungan bisa dihubungkan dengan penggunaan koherensi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan berita adalah wartawan sebagai peliput berita.

Hal ini berkaitan dengan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media yang berpandangan bahwa proses pembuatan berita dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Shoemaker & Reese: 1966). Sehingga pandangan *media as channel* yaitu sebagai cerminan realitas kini berkembang menjadi *media as participants* yang memiliki pengaruh mbingkai realitas. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat dipahami bahwa media memiliki peranan dalam menciptakan realitas.

Adapun jenis koherensi yang terdapat dalam teks ini adalah koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi kontemporal, koherensi perurutan dan koherensi intensitas.

Adapun koherensi kausalitas dapat dilihat dari pernyataan:

"Kekuatan-kekuatan Islamis bermaksud mengubah negara yang beraneka ragam menjadi negara teokrasi. Sampai saat ini, serangan teroris terutama menargetkan minoritas Kristen".
(Menit: 03.09-03.18)

Berdasarkan kalimat tersebut, media memberi kesan bahwa kekuatan-kekuatan Islamis bermaksud mengubah negara Indonesia menjadi negara teokrasi, dan hal ini menyebabkan terjadinya serangan teroris yang menargetkan umat Kristiani sebagai agama minoritas. Media berpendapat bahwa serangan-serangan teroris terhadap minoritas disebabkan oleh kekuatan Islamis, hal ini didukung oleh pernyataan:

“Di tingkat nasional organisasi garis keras itu (FPI) diyakini memiliki sekitar 200.000 anggota aktif. Mereka bertanggung jawab atas serangan berulang terhadap minoritas agama” (05.05-05.15)

Media dalam hal ini mengkhususkan organisasi FPI sebagai kekuatan Islamis yang bertanggung jawab atas serangan berulang terhadap minoritas agama, Kristen.

“Pemerintah pusat di Jakarta khawatir melarang Front Pembela Islam, karena dukungan akar rumput yang menyebar luas untuk propaganda populisnya”. (6.10-6.18)

Selain itu media memberi gambaran bahwa organisasi FPI memiliki dukungan yang banyak sehingga pemerintah walaupun merasa terancam, tetap merasa khawatir untuk melarangnya. Pernyataan tersebut memberi kesan bahwa Islam sebagai agama mayoritas menjadi ancaman bagi agama-agama minoritas. Dengan gambaran bahwa FPI yang dijadikan tersangka teroris memiliki pendukung yang banyak di masyarakat, hingga pemerintah sebagai pemimpin negara tidak dapat bertindak tegas.

Koherensi kontras dapat dilihat dari pernyataan:

“Setelah mengalami tiga dekade masa kediktatoran, Indonesia di mata barat membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bisa saling cocok. Tetapi Indonesia, seperti di negara-negara muslim lainnya, sedang berjuang dengan peran Islam dalam masyarakat modern. (Menit 2.42-2.3.07)

“98 persen dari penduduk Provinsi Aceh adalah muslim. Islam selalu menjadi kompas utama untuk kehidupan di sini. Tetapi interpretasi yang semakin ketat dan penerapan hukum Syariah telah membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit terutama bagi perempuan”. (16.10-16. 28)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media menggambarkan bahwa Aceh dengan penerapan hukum Syariah menjadikan kehidupan sulit khususnya bagi perempuan. Secara implisit media ini ingin menyinggung paham feminisme yang lahir dari gerakan kesetaraan gender, dan hukum Syariah bertentangan dengan paham feminisme.

Koherensi kontemporal dapat dilihat dari pernyataan:

“Aceh merupakan kesultanan muslim independen hingga 1903. Provinsi ini selalu lebih konservatif daripada sebagian besar provinsi yang membentuk Indonesia”. (15.02-15.12)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum menerapkan hukum Syariah, Aceh merupakan kesultanan muslim independen 1903. Hal ini menjadikan hukum Syariah didukung sebagian besar masyarakat di Aceh.

Menurut pandangan konstruktivis wartawan adalah agen konstruksi. Wartawan bukanlah pelapor di mana melihat dan menulis fakta apa adanya melalui pengamatan di lapangan. Karena bagaimana wartawan melihat dan memaknai peristiwa tentu dipengaruhi oleh banyak hal yang mempengaruhi persepsinya dalam menilai realitas. Eriyanto berpandangan bahwa wartawan adalah pihak yang menjembatani keragaman subjektivitas peristiwa terhadap khalayak (Eriyanto, 2011). Berdasarkan perangkat koherensi, peneliti menyimpulkan bahwa media melihat *zero tolerance* dalam lingkup yang fokus pada Islam. Islam konservatif melalui penerapan hukum Syariah menjadikan kehidupan menjadi sulit. Dikaitkannya antara FPI dengan serangan teroris menunjukkan bahwa media menggambarkan FPI sebagai organisasi yang berbahaya dan mengancam keutuhan Indonesia.

Struktur Retoris. Struktur retorik merupakan struktur yang menganalisis pemilihan kata sehingga mempengaruhi arti tertentu yang dapat menekankan makna ke dalam berita. Penekanan arti pada struktur ini dapat diamati melalui bagaimana penulis dalam pemilihan kata, gambar, idiom yang digunakan. Pemilihan kata, idiom dan sebagainya bukan hanya untuk menggambarkan suatu peristiwa melainkan juga dapat menekankan arti tertentu kepada khalayak. Berdasarkan

struktur retorik, teks dapat dianalisis melalui bagaimana cara wartawan menekan fakta, melalui pemilihan kata, penggunaan idiom, gambar serta grafik yang digunakan.

Media berperan penting dalam memberi citra tertentu terhadap aktor atau peristiwa dalam berita. Pemberian tanda pada sebuah peristiwa atau aktor yang terlibat akan memberikan makna tersendiri yang akan menentukan bagaimana peristiwa dimengerti, bagaimana seseorang dinilai dalam sebuah berita apakah dianggap baik atau buruk. (Eriyanto, 2011)

Adapun gambar *thumbnail* yang digunakan dalam film ini adalah gambar Abi Wahid, seorang pria yang menggunakan sorban, dan memiliki janggut. Dalam foto tersebut juga terdapat kata *Zero tolerance* yang hal ini dapat memberi perspektif bahwa media ingin memberikan label *zero tolerance* kepada umat muslim secara spesifik melalui simbol-simbolnya seperti janggut dan sorban. Pemilihan kata, foto serta angle dalam berita dipengaruhi oleh ideologi media (Syuderajat, 2018). Beberapa pemilihan kata dan pelabelan kepada pihak tertentu akan memberikan kesan tertentu di mata khalayak. Peristiwa yang sama bisa dikonstruksi secara berbeda oleh wartawan melalui penggunaan kata maupun gambar.

Kata kekuatan "Islamis" yang terdapat pada pengantar film ini digunakan media untuk menjelaskan kelompok militan, ekstrimis dan radikal. Hal ini didukung oleh kata teroris dengan peristiwa pengeboman dan prosesi pemakaman Kristiani. Media ini juga menambah pernyataan bahwa tujuan kekuatan Islamis adalah mengubah negara Indonesia menjadi negara teokrasi melalui serangan teroris terhadap umat minoritas. Kesimpulannya bahwa media ingin menekankan bahwa ancaman dari keberagaman di Indonesia berasal dari kekuatan Islamis yang ingin mengubah negara Indonesia sebagai negara "teokrasi" dengan cara melakukan serangan teroris.

"Abi Wahid adalah pemimpin Front Pembela Islam cabang Aceh. Di tingkat nasional organisasi garis keras itu diyakini memiliki sekitar 200.000 anggota aktif. Mereka bertanggung jawab atas serangan berulang terhadap minoritas agama". (Menit 4.08-4.17)

"Abi Wahid menunjukkan kepada kita galeri pahlawannya, termasuk dua diktator...di matanya mereka adalah pejuang dalam memperjuangkan hak Islam. Di sebuah rumah di mana gambar-gambar Islam radikal menghiasi dinding, kita mungkin seharusnya tidak mengharapkan diskusi politik yang jujur". (Menit: 12.15-12.40)

Kata "organisasi garis keras" yang dicitrakan kepada organisasi Front Pembela Islam (FPI) memberi kesan negatif terhadap FPI. Media mengkonstruksi citra FPI dalam model *bad news*. Didukung oleh pernyataan media bahwa organisasi ini bertanggung jawab atas serangan teroris terhadap minoritas agama. FPI juga dinilai memiliki tujuan tertentu dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku orang lain hal ini karena media menilai organisasi ini melakukan "propaganda". Dalam menggambarkan organisasi FPI media ini mengaitkan dengan kejadian demonstrasi yang dipimpin FPI pada November 2016 yang berlangsung ricuh dan berujung pada aksi kekerasan. Demonstrasi FPI pada tahun 2016 dikenal dengan "Aksi Damai 4 November" berkaitan dengan kasus penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini memberikan citra negatif kepada FPI ditambah dengan beberapa pernyataan media. FPI digambarkan sebagai organisasi yang tidak berperikemanusiaan yang berbau kekerasan.

Kata "diktator" dan "Islam radikal" yang ditujukan kepada Muammar al-Gaddafi dari Libya dan Saddam Hussein dari Irak memberikan citra negatif kepada kedua tokoh Islam ini, karena mereka digambarkan sebagai pemimpin yang otoriter dalam memimpin dan menindas rakyatnya.

"Konservatif" dan "ekstrimis" ditujukan kepada hukum Syariah yang berlaku di Aceh, digambarkan melalui peristiwa hukum cambuk. Melalui pernyataan media bahwa penerapan hukum Syariah menjadikan kehidupan menjadi sulit terutama bagi perempuan memberi pandangan bahwa hukum Syariah di era modern tidak efektif.

Framing memiliki dua karakteristik, yaitu bagaimana peristiwa dimaknai serta bagaimana fakta ditulis (Eriyanto, 2011). Fakta apa yang ingin disajikan akan mempengaruhi bagaimana peristiwa dimaknai. Pemilihan fakta akan mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam

memahami peristiwa. Bagaimana fakta ditulis berkaitan dengan pemilihan kata, penggunaan simbol atau *idiom*, dan gambar yang digunakan dalam sebuah berita.

Media membingkai *zero tolerance* kepada pihak Islam, yang digambarkan dengan Islam radikal, diktator, militan, dan ekstrimis. Ekstrimisme bukanlah monopoli satu agama semata, seperti di Irlandia ada konflik antar umat Katolik dan Kristen, dan di India ada ekstrimis Hindu (Yunus, 2017). Melalui penggunaan gambar dan pemilihan kata, media menekankan bahwa Islam sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis intoleransi yang menyebabkan adanya terorisme dan menjadi ancaman keutuhan keberagaman di Indonesia.

Simpulan

Merujuk pada telaah analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, maka ada beberapa simpulan berdasarkan hasil penelitian. *Pertama*, DW Documentary membingkai ancaman dalam keberagaman di Indonesia berdasarkan dua isu, yaitu *zero tolerance* (krisis toleransi) dan isu korupsi. Namun melalui analisis film, media lebih menonjolkan isu toleransi yang dinilai lebih dominan menjadi ancaman dibandingkan korupsi yang melalui penerapan hukum Syariah, hukum yang dinilai. *Kedua*, *zero tolerance* digambarkan melalui penerapan hukum Islam, yaitu hukum Syariah yang berlaku di provinsi Aceh. Hukum yang dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan paham feminisme serta mendiskriminasi masyarakat minoritas, di mana hal ini berpotensi sebagai ancaman dalam persatuan di Indonesia. *Ketiga*, pihak yang dinilai menjadi pelaku *zero tolerance* adalah masyarakat Islam yang konservatif dan organisasi Islam, digambarkan melalui penggunaan simbol Islam seperti sorban, janggut, serta cadar. Media menggambarkan bahwa FPI (Front Pembela Islam) adalah organisasi yang ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara teokrasi melalui serangan teroris kepada kaum minoritas. Media melabeli Islam konservatif dan organisasi FPI dengan citra negatif melalui pemilihan kata radikal, organisasi garis keras, diktator, dan ekstrimis. *Keempat*, media memberi solusi untuk menjaga persatuan yaitu dengan menentang korupsi dan nepotisme, menentang konsensi kepada kaum Islamis yang dinilai membatasi kebebasan, serta menentang intoleransi. Sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas Islam, peranan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara tergantung bagaimana sikap masyarakat muslim. Dalam hal ini media menaruh harapan khususnya kepada masyarakat muslim untuk berpandangan terbuka melihat dunia sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, E. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Berger, P.L. dan Luckmann, T.. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Terj. Basari Hasan. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- CNN Indonesia. (2021). *SETARA: Negara Dominasi Pelanggaran Kebebasan Beragama*. <https://www.cnnindonesia.com> tanggal 5 Desember 2020.
- Darsono, D & Muhaemin, E. (2012). *Secangkir Peristiwa di Mata Wartawan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- DW Documentary. *About DW*. <https://www.dw.com> tanggal 14 November 2021.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Fikri, M. (2012). *Konflik Agama dalam Media Berita Online* (Kajian Kritis Pemberitaan Konflik Cikeusik dalam Portal Viva.co.id (pada periode bulan Februari). *Jurnal Komunikasi dan Realitas Sosial*, 4(4).
- Martini. (2018). Skripsi: *Konstruksi Aksi Damai 4 November 2016*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Misrawi, Z. (2012). Kesadaran Multikultural dan Deradikalisasi Pendidikan Islam, Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul Al-Akhar. *Jurnal Pendidikan Islam*. 1(2).
- Muhaemin, E. & Sanusi, E. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 3(1)
- Sadulloh. (2003). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Setara Institute. (2020). *Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir*. <https://setara-institute.org> tanggal 1 November 2021.
- Shoemaker, P. J. & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Messages: Theories of Influences on Mass Media Content* (2nd Edition). USA: Logman Publisher.



- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing* Cet. Ke II. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo, A. (2009). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS
- Syuderajat, F. (2018). Idiologi Surat Kabar dalam Pemberitaan Terorisme. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1), 1-12
- Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an*. 13(1)
- Zakiyah. (2015). Agama dalam Konstruksi Media Massa: Studi terhadap Framing Kompas dan Republika pada Berita Terorisme. *Analisa Journal of Social and Religion*. 22(1)

